

NYULI

Volume 1

Nomor 2, Oktober 2020

Halaman 89 - 158

Restorasi Meiji dan Kekuatan Ekonomi Politik Jepang

Kisno Hadi

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kristen Palangka Raya*

Email: kisnohadi2020@gmail.com

Abstract

This article is a research that using qualitative descriptive method and literature approach. It describes on the rise of economic and political power of Japan since Meiji Restoration. There are four research result i.e., firstly, Meiji Restoration was an openness era for structure and sistem of state administration of Japan. Confusionism tradition as characteristic of Japan's culture became the spirit that impact for strenghtening economic and political power of Japan until nowadays. Secondly, the involvement of Zaibatsu (rich family grups) to build economic system by fasilitating these groups to set up multinational companies and paved the way to invest to abroad contries. Thirdly, Japan has confirm the policy that investment of the Zaibatsu company in abroad country is supporting national interest. In other words, domestic investment takes precendence. And the last, the main weakness of Japan is avoidance to make direct competition to US in it's foreign policies. As the result, disparity of investment between domestic and abroad. This research will analysis by applying political economic power approach of Caporaso.

Keywords: Meiji Restoration, Economy politic, Power, Political Institution, Policy.

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsi tentang kebangkitan dan kekuatan ekonomi politik Jepang pasca Restorasi Meiji. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menemukan, Pertama, Restorasi Meiji membawa keterbukaan bagi semua struktur dan sistem dalam ketatanegaraan Jepang, kemudian budaya Jepang yang berakar dari tradisi konfusianisme menjadi spirit bangsa Jepang yang berpengaruh bagi

terbentuknya kekuatan ekonomi dan politik Jepang saat ini; Kedua, kekuatan Jepang secara ekonomi dan politik di kawasan Asia berkat adanya kebijakan politik kekuasaan yang memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat ekonomi Jepang membangun sistem perekonomian, di mana keluarga-keluarga pedagang yang berakar kuat sejak pemerintahan Meiji termasuk kalangan samurai bertransformasi mendirikan perusahaan-perusahaan multinasional dan negara membuka jalan bagi mereka untuk berinvestasi ke luar negeri; Ketiga, Jepang menerapkan agenda-agenda ekonomi dan politik yang tidak melebihi kepentingan nasionalnya dalam investasi luar negeri; dan Keempat, kelemahan utama Jepang ialah tidak mau berhadapan langsung dan berbeda pendapat dengan Amerika Serikat dalam kebijakan politik luar negeri dan terjadi disparitas investasi luar negeri di banding perekonomian dalam negeri. Analisis tulisan ini menggunakan pendekatan ekonomi politik kekuasaan dari Caporaso.

Keyword: Restorasi Meiji, Ekonomi politik, kekuasaan, institusi politik, kebijakan.

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pandemi Covid 19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 semakin mengokohkan pengaruh Jepang di kawasan Asia, khususnya bagi negara-negara di Asia Tenggara. Per September 2020 Jepang berhasil menekan penyebaran infeksi Covid 19 dan angka kematian terhadap warga negaranya pada tingkat yang paling rendah dibanding negara-negara lain yang terdampak yakni dengan angka 79.900 terkonfirmasi positif serta 1.519 kematian (Antarnews.com, 23/09/2020). Atas dasar itu, Jepang sudah jauh-jauh hari membantu negara-negara lain khususnya di kawasan ASEAN untuk menekan angka infeksi, kematian serta penanganan dampak pandemi. Dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) khusus ASEAN tentang Covid 19 yang dilaksanakan daring pada 14 April 2020, dipimpin PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc selaku Ketua ASEAN 2020, turut diselenggarakan KTT ASEAN *Plus Three* (APT) yang diikuti 3 negara mitra yaitu Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan.

Kesepakatan KTT hari itu ialah komitmen bersama mengatasi wabah dan mempersiapkan pemulihan pasca-wabah baik sosial maupun ekonomi. Kerjasama internal ASEAN yaitu *Declaration ASEAN 2020*, ialah 10 negara anggota menyepakati kemauan saling bertukar informasi, *best practice*, pengembangan riset, pengembangan epidemiologi, perlindungan warga negara ASEAN, memperkuat komunikasi publik, memerangi stigmatisasi dan

diskriminasi, aksi kolektif dan kebijakan terkoordinasi dalam mitigasi dampak ekonomi-sosial, pendekatan komprehensif melibatkan *multi-stakeholders* dan *multi-sectorals*, menugaskan menteri-menteri ekonomi ASEAN untuk memastikan berjalannya *supply chain connectivity* guna memastikan perdagangan berjalan baik, dan mendukung relokasi *Trust Fund* ASEAN guna penanganan pandemi Covid 19 (Kompas, 17/4/2020).

Peran mitra dalam mekanisme ASEAN+3 yakni Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan diperlukan untuk mendukung skema dana regional, yaitu sebagai dana respon (*Respond Fund*) yang bertujuan mengamankan ketersediaan pasokan medis dan peralatan penting lainnya di kawasan ASEAN, yang bersumber dari realokasi dana yang tersedia. Dana ini disertai komitmen untuk menahan diri dari pengeluaran yang tidak perlu pada aliran barang strategi dalam memerangi Covid 19 seperti medis, makanan, dan persediaan esensial (*Declaration ASEAN 2020*). Dalam konteks ini, dapat dilihat, sebagai negara mitra yang jauh lebih responsif beradaptasi menghadapi pandemi Covid 19, Jepang hendak menancapkan pengaruh lebih luas di ASEAN, di samping Tiongkok yang sudah jauh hari melakukannya, terutama dalam merespons kebijakan ekonomi-politik luar negeri Amerika Serikat (AS).

Fakta di atas mengonfirmasi bahwa Jepang adalah kekuatan ekonomi politik di Asia setelah Tiongkok. Hampir semua pengamat tentang Jepang mengatakan bahwa kekuatan utama Jepang dalam bidang ekonomi, politik, dan birokrasi pemerintahan yang bersih hingga hari ini berawal dan dimulai pada 3 Januari 1868, yakni tatkala terjadi reorganisasi fundamental terhadap struktur dan kekuatan politiknya. Reorganisasi terjadi dalam sistem pemerintahan serta pola hubungan pusat dan daerah dari yang semula terdesentralisasi ke sentralisasi, dari yang semula feodal dan aristokrasi ke demokrasi, dan dari yang semula tradisional ke modern. Theda Skocpol diantara ilmuwan politik yang mengatakan bahwa di tahun 1868 hingga 1873 terjadi apa yang disebut Restorasi Meiji (Pembaruan Meiji) yang merupakan peristiwa transisi dari era feodal ke dalam sebuah era perekonomian baru atau tepatnya sebagai bentuk peralihan birokrasi di Jepang dari birokrasi feodal dan aristokrasi yang didasarkan secara regional, yang membentuk sistem *baku-han* (pemerintahan provinsi) di bawah hegemoni *Shogunate Tokugawa*, kemudian diubah menjadi dan membentuk sistem negara nasional birokratik yang dikendalikan secara terpusat oleh Kaisar Meiji (Skocpol, 1991: 99-100).

Menarik untuk mengkaji dan menyajikan tentang kekuatan ekonomi-politik Jepang hingga hari ini, di mana berdasarkan analisa-analisa data yang ada kondisi tersebut berawal dari pembaruan Meiji. Pembaruan Meiji merupakan awal kebangkitan sistem ekonomi dan politik Jepang yang kemudian berdampak kepada sistem pemerintahan, birokrasi dan invasi kekuatan ekonomi politik luar negeri Jepang terutama di kawasan Asia. Fakta kekuatan Jepang di kawasan terlihat pada saat krisis ekonomi Asia tahun 1997 ketika Jepang melempar ide membentuk *Asia Monetary Fund* (AMF), sebagai tandingan *International Monetary Fund* (IMF) yang digagas AS. Tujuan pembentukan AMF adalah untuk membantu negara-negara Asia mengatasi krisis. Tampak peran tersebut digunakan Jepang dalam rangka menaikkan pamor sebagai pemimpin yang kuat dan tegas, serta memperluas pengaruh di Asia. Terakhir ialah keterlibatan Jepang mengatasi pandemi Covid 19 dalam mekanisme kerjasama ASEAN+3 di kawasan Asia Tenggara.

Tulisan ini akan mendeskripsi tentang Restorasi Meiji dan pengaruhnya terhadap kekuatan ekonomi politik Jepang sebagai sebuah negara, serta mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi politik Jepang sebagai sebuah kekuatan signifikan di Asia. Kendati demikian, kekuatan Jepang bukannya tanpa kelemahan, di mana analisisnya akan dielaborasi di bagian akhir tulisan ini. Pertanyaan yang muncul dan hendak dijawab melalui tulisan ini ialah *Pertama*, bagaimana Restorasi Meiji terjadi?; *Kedua*, bagaimana pengaruh Restorasi Meiji terhadap sistem politik dan ekonomi Jepang? Dan *Ketiga*, bagaimana Jepang mengembangkan kekuatan ekonomi politik di kawasan Asia khususnya ASEAN?

2. Metode Penelitian

Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian yang dilaksanakan bulan Juni-Juli 2020 dengan pendekatan studi pustaka atau literatur. Metode penelitian ialah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif pustaka menurut Creswell digunakan sesuai dengan asumsi metodologis dan harus secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan yang diajukan peneliti. Pertanyaan muncul dari masalah itu sendiri. Penelitian kualitatif pustaka bersifat penyelidikan, topik atau populasi belum banyak ditulis dan penelitian harus menggunakan dasar informasi yang benar yakni berupa literatur-literatur yang relevan (Creswell, 2002: 19). Literatur utama yang dianalisis dalam penelitian ini ialah karya klasik dan kontemporer ilmuwan politik tentang Jepang.

Karya klasik dimaksud ialah Herbert Norman (1946) dan Nobutaka Ike (1958). Kemudian ada karya kontemporer dari Theda Skocpol (1991) dan Moon dan Young-Rhyu (2000). Mendasarkan pada penelitian politik, maka analisis dalam penelitian ini menekankan pada perilaku dan institusi politik, bukan semata aspek hitoris, sosiologis dan terlebih psikologis (Harrison, 2007: 2-3).

3. Kajian Teori

Ekonomi politik secara eksplisit didefinisikan sebagai interelasi diantara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, dll). Pendekatan ekonomi politik mengaitkan penyelenggaraan politik, baik menyangkut aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat maupun yang diintrodusir negara. Pendekatan ini menempatkan politik sebagai subordinat ekonomi, di mana instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisa dengan menggunakan *setting* politik. Pendekatan ini melihat bahwa ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan (*away of acting*), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut (*a place to act*). Pendekatan ekonomi politik mempertemukan antara bidang ekonomi dan politik dalam hal alokasi sumber daya ekonomi dan politik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga implementasi kebijakan ekonomi politik selalu mempertimbangkan struktur kekuasaan dan sosial yang menjadi sasaran kebijakan (Yustika, 2009: 7-9).

Dalam konteks demikian salah satu fokus utama pendekatan analisis ekonomi politik ialah interaksi antara kekuasaan dengan fenomena ekonomi, kendati terdapat hambatan dalam interaksi keduanya. Konsep kekuasaan yang paling sederhana, banyak dianut dan mudah dipahami secara intuitif ialah pandangan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan. Kekuasaan merupakan bentuk pengungkapan ide bahwa untuk mencapai tujuan maka harus dilakukan sesuatu untuk mempengaruhi dan mengubah dunia sekitar (Caporaso, 2008: 391).

Di Jepang, akumulasi modal dalam ekonomi terbentuk dan berasal dari tiga jaringan utama pada masa kekuasaan Kaisar Meiji (1868-1912) yaitu budaya, negara dan kerjasama. Budaya konfusianisme, struktur kekuasaan negara dan sistem kerjasama negara-masyarakat (terutama masyarakat ekonomi dan eks samurai) yang dibangun Meiji telah mendorong warga negara Jepang membentuk nasionalisme memajukan negara, bahkan dengan

kekuatan dan jaringannya Jepang terdorong mempertajam pengaruh di kawasan Asia terutama Asia Timur dan Asia Tenggara melalui investasi luar negeri (Moon and Rhyu, 2000: 77). Dapat dipahami apabila Jepang mampu mensub-ordinat negara-negara tetangga secara ekonomi, yakni karena kebijakan ekonomi didukung oleh kekuatan budaya, struktur kekuasaan dan kemampuan membangun kerjasama secara kuat sejak lama.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Awal Keterbukaan Jepang

Egalitarianisme demokratis barangkali dapat menjadi konsep yang tepat untuk menggambarkan peristiwa keterbukaan Jepang terhadap demokrasi di mana terjadi sebuah peristiwa yang disebut Restorasi Meiji (Pembaruan Meiji). Peristiwa pada 1868 itu telah membawa Jepang melakukan reorganisasi fundamental terhadap struktur dan kekuatan politiknya, termasuk keterbukaan ekonomi, serta dari pemerintahan desentralistik ke sentralistik, dari sistem politik feodal dan aristokrasi ke demokrasi, dan dari negara tradisional ke negara modern. Lomperis dengan mengutip Pye (1985) dan Bell (2000) menyebut bahwa kekhasan politik Asia ialah beradaptasi dan mampu memodifikasi demokrasi agar dapat ditanam di Asia. Hal ini harus dilakukan sebab dasar-dasar ide demokrasi Barat berbeda dengan kesimpulan pemikiran Asia. Jika di Barat ide demokrasi didasarkan pada individu sebagai unit dasar politik, ada kesetaraan dalam politik dan penghormatan terhadap aturan-aturan politik, maka di Asia demokrasi didasarkan pada kelompok atau komunitas, hierarki, klientisme, dan aturan kelompok (Lomperis, 2013: 907).

Di Jepang, klan Yamato memproklamirkan diri sebagai “dewa” yang menciptakan garis aristokrasi terpanjang dalam sejarah yang kemudian membentuk pemahaman nasionalisme dan identitas etnis yang berakar kuat dalam tradisi Jepang. Nasionalisme dan identitas etnis melahirkan sikap terbuka bagi Jepang di mana mereka memandang diri bukan sebagai satu-satunya ras manusia terkuat. Mereka tidak enggan meminjam tradisi lain untuk memperkuat identitas seperti konfusianisme dan Budha, yang di kemudian hari membentuk keyakinan Shinto, membentuk kultur, sistem kekuasaan, kesatria (petarung) politik dalam diri Bushido sehingga mengokohkan kelas samurai dalam kultur politik (Lomperis, 2013: 908). Setiap orang Jepang adalah kesatria

Bushido yang harus memenangkan pertarungan dalam setiap aspek kehidupan.

Restorasi Meiji (Pembaruan Meiji) terjadi dalam rangka membuka Jepang terhadap pergaulan internasional terutama bidang ekonomi, agar ekonomi Jepang tidak berjalan sendiri dan tertutup. Restorasi Meiji adalah peristiwa pemberontakan sejumlah samurai Jepang terhadap pemerintahan Tokugawa pada 3 Januari 1868. Tokugawa berkuasa pada 1603-1867, di mana dalam masa itu Jepang menutup diri dari pengaruh luar yang dianggap sebagai ancaman, termasuk menutup pelabuhan laut. Kebijakan ini disebut sebagai politik isolasi (*Sakoku*). Kedatangan Komodor Matthew C. Perry dari AS mengubah pandangan tersebut. Masyarakat Jepang tiba-tiba merasa inferior karena Komodor Matthew datang membawa kapal-kapal perang besar lengkap dengan persenjataan serta teknologi yang jauh melampaui kemampuan militer Jepang. Kedatangan Komodor Matthew memicu pembukaan pelabuhan-pelabuhan laut di seluruh wilayah Jepang untuk kegiatan perdagangan.

Namun warga Jepang khawatir bahwa pemimpin mereka Tokugawa Yoshinobu sebagai *Shogun* (kepala pemerintahan aristokrat) yang feodal tidak siap terbuka terhadap asing. Maka mereka meminta bantuan kepada para samurai (pemimpin dan pasukan militer) dari wilayah-wilayah terpencil untuk bergabung dengan bangsawan anti-Shogun guna mengembalikan Kaisar ke tampuk kekuasaan setelah 700 tahun. Bersama warga sipil, para samurai berhasil menggulingkan kekuasaan Tokugawa Yoshinobu dan mendeklarasikan Meiji sebagai Kaisar Jepang yang baru. Yoshinobu adalah *Shogun* terakhir yang berkuasa, dan walaupun ia sempat melakukan perlawanan namun akhirnya menyerah pada Juni 1869. Setelah didaulat menjadi Kaisar, Meiji bersama para menteri kemudian memindahkan Istana dari Kyoto ke Tokyo. Meiji berhasil melakukan reformasi dan mengubah secara fundamental paham feodalisme ke paham demokrasi dan menjadikan Barat sebagai acuan. Pembaruan ini dikenal sebagai Restorasi Meiji atau Pembaruan Meiji (Norman, 1946: 254).

Pemerintahan baru yang dibentuk Kaisar Meiji berhasil memantapkan langkah industrialisasi dan militerisasi yang pesat bagi Jepang. Restorasi Meiji terbukti mampu membangun Jepang menjadi salah satu kekuatan utama dunia dalam bidang ekonomi, politik dan militer pada awal abad ke-20. Kaisar Meiji meninggal dunia pada 30 Juli 1912 dan mewariskan takhta Kaisar kepada putranya Taisho. Meiji meninggalkan warisan yang jauh sangat bermanfaat

bagi Jepang, di mana dulunya tertutup dari dunia luar dan menganut paham feodal, namun kini menganut paham demokrasi yang terbuka kepada modal asing. Dengan keterbukaan tersebut Jepang kini menjadi salah satu negara berpengaruh di dunia dalam konteks ekonomi dan politik. Bahkan untuk beberapa kasus di kawasan Asia, Jepang menjadi *big brother*.

Dapat dipahami bahwa Pembaruan Meiji terjadi karena *Pertama*: otoritas kedaulatan politik Tokugawa atas *han* (provinsi) sudah melemah sebagai akibat buah perjuangan kalangan elit-elit politik Jepang sendiri yang sudah mulai jenuh dengan sistem politik dan ekonomi yang dijalankan secara desentralisasi dan tertutup berdasarkan *han* saja; *Kedua*, adanya tekanan Barat terutama negara-negara industri di Barat agar Jepang membuka pelabuhan lautnya bagi kapal-kapal dan pedagang asing, indikasi melemahnya otoritas Jepang terhadap tekanan Barat dimulai sejak tahun 1853 dengan tibanya kapal Admiral Perry dipimpin Komodor Matthew C. Perry dari AS di pelabuhan Jepang; *Ketiga*, rezim Tokugawa yang struktur pemerintahannya tidak terpusat secara nasional melainkan terkonsentrasi di *han* saja, membuat kalangan bangsawan yang terkonsentrasi di *han* merasa kurang memiliki akses terhadap pemerintahan yang ada, lalu mereka menggunakan kekuatan militer yang dapat mereka pengaruhi di setiap *han* secara setahap demi setahap melakukan sejumlah perubahan administrasi dan sosial secara fundamental;

Keempat, restorasi mengubah dan meniadakan status aristokrat yang membuat semua orang Jepang sama di depan hukum; *Kelima*, sistem yurisdiksi administrasi yang terpecah-pecah dan terdesentralisasi kemudian diganti dengan sistem pemerintahan nasional yang sangat birokratis, terpusat dan bersatu, dan kemudian melakukan reformasi yang lebih jauh dari atas, termasuk industrialisasi yang didukung oleh negara; *Keenam*, di Jepang juga tidak ada tuan tanah yang dapat membentuk elit yang secara politik kuat, kendati ada sedikit tuan tanah yang hidup makmur di desa-desa dan pusat-pusat pasar, namun bersama kaum pedagang kehidupan mereka terpisah dari kekuasaan administratif dan militer, sehingga secara politis mereka tidak kuat, dan tatkala terjadi reformasi, dengan mudah kekuatan administrasi negara lokal dirombak.

2. Kekhasan Struktur Pemerintahan dan Kebijakan

Kekhasan utama yang dijalankan Jepang dalam struktur pemerintahannya ialah pemerintahan yang bertumpu pada kekuatan budaya

mereka sendiri. Sejak zaman Meiji, bukan hanya struktur pemerintahan yang berubah tetapi di bidang-bidang lainnya seperti *Pertama*, di saat Jepang melihat adanya penurunan peran pertanian, maka mereka meningkatkan struktur dan peran industri manufaktur, juga melakukan perubahan dalam struktur industri dari industri ringan menjadi industri berat dan kemudian menjadi industri yang padat ilmu pengetahuan. Jepang juga memperluas peran perusahaan-perusahaan multinasional, pemeratakan distribusi pendapatan, membuat kebijakan peralihan demografi dengan cara urbanisasi;

Kedua, melakukan pembangunan model dualistik yakni pembangunan teknologi modern yang padat modal dengan ditopang oleh sektor tradisional berskala kecil. Ini dilakukan dalam rangka menguatkan sektor tradisional sembari membangun sektor teknologi modern yang kuat. Ini pula yang disebut dengan kebijakan mendampingkan antara sektor modernisasi dengan sektor tradisional; *Ketiga*, adanya pemberlakuan asketisisme, yakni reformasi konsep konfusianisme dalam budaya kerja masyarakat Jepang, yang diimplementasi dalam etika kerja yang kuat, kontrol politik yang kuat terhadap rakyat, hingga budaya pekerja keras dengan sistem intensif yang kuat;

Keempat, Restorasi Meiji menjadi semacam demarkasi Jepang berangkat dari sistem politik tradisional menuju ke sistem politik modern dan demokrasi, yang membawa ke suatu revolusi politik dan membawa Jepang menjadi negara kapitalis. Dalam masa ini pemerintah mengurangi keterlibatannya dalam industrialisasi dan memainkan peran aktif dalam mengembangkan pendidikan, membangun prasarana, dan menciptakan lingkungan yang baik bagi usaha-usaha ekonomi swasta. Pemerintah di sini bertindak sebagai investor, perencana, dan pembaru; *Kelima*, pemerintah diciptakan menjadi kuat sebagai warisan dari sikap patuh terhadap pemimpin; *Keenam*, hasil yang dicapai Jepang di masa kini ialah sebagai bentuk evolusi terus menerus selama berabad-abad jauh sebelum masa Meiji, sehingga kemajuan Jepang hari ini tidaklah instan melainkan sudah berproses sejak lama; *Ketujuh*, pemerintah Jepang yang kuat ditopang oleh swasta yang kuat, sebab itu pemerintah berusaha mengubah perilaku rakyat dengan pendidikan yang baik dan berkualitas, lembaga-lembaga kapitalis pun muncul sebagai hasil kebijakan di bidang pendidikan, semua itu sudah berproses sejak lama (Ike, 1958: 135-238).

Kondisi politik yang stabil bukan berarti membawa kestabilan secara menyeluruh dan terus menerus, tetapi adakalanya memburuk, di mana hal ini

dialami Jepang tatkala kalah dalam Perang Dunia II. Namun semua itu tak membuat Jepang terpuruk begitu saja. Kebangkitan ekonomi Jepang yang cepat dan luar biasa pasca PD II akhirnya dapat membawa ke kemakmuran. Namun demikian, ada juga elit-elit Jepang terlena sehingga mereka lebih banyak memikirkan diri sendiri, para individu pun sibuk memikirkan popularitas sendiri-sendiri. Maka tatkala ekonomi sulit melanda dan keadaan semakin memburuk, jalan yang ditempuh pemerintah ialah berusaha mencari penyelesaian secara politik, di mana adanya komitmen politik sebagai hasil interaksi antara lembaga formal dengan lembaga informal yang lazim disebut sebagai “kokutai politics”, yakni terjadinya *informal negotiations* antara partai pemerintah dengan partai oposisi untuk melakukan *deal* politik. Proses penyelesaian masalah semacam ini cenderung menjadi tradisi dalam politik Jepang. Walaupun terkadang dalam beberapa kasus kurang berfungsi, namun tradisi semacam ini sering sebagai *integrated system* dalam kehidupan politik Jepang.

Budaya konsensus merupakan budaya politik Jepang dalam pengambilan keputusan yang sering melibatkan kepentingan partai politik, politisi, birokrat, kaum intelektual, media massa, dan kalangan pengusaha. Itu semua akibat pengaruh dari sejarah politik dan pemerintahan Jepang yang secara bertahap pernah mengalami militerisme, menganut fasisme, negara otoriter dan kemudian menjadi negara demokrasi. Jepang juga pernah menjalankan pemerintahan *two-party system*, pemerintahan koalisi, dan pemerintahan *one party system*. Secara politik, budaya politik Jepang menganut sistem *consensus*, *the spirit of harmony*, dan berusaha menghindari konflik internal. Kendati demikian, praktik intrik politik, persengkokolan, pertentangan, persaingan, dan perubahan radikal dalam sistem politik juga seringkali terjadi. Kondisi demikian membuat pandangan yang mengatakan kebudayaan dan adat istiadat Jepang yang berakar dari konfusianisme selalu baik, menjadi relatif.

3. Keberadaan Birokrasi

Birokrat memiliki posisi penting dalam kehidupan politik Jepang. Para birokrat direkrut berdasarkan ujian yang sangat ketat dari sejumlah universitas terkenal yang bereputasi baik dan tinggi. Tokoh birokrat berfungsi penting dalam menentukan kebijakan negara. Citra yang diberikan kepada kalangan birokrat Jepang ialah bahwa mereka merupakan orang-orang pilihan yang

berkemampuan dan berdedikasi tinggi, dapat memutuskan kebijakan negara secara cepat dan tepat, dan sama sekali tidak menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan materi. Mereka bekerja penuh pengabdian kepada bangsa dan negara. Namun terkadang kondisi demikian justru sering dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha untuk melakukan *deal* dan kontak-kontak informal melalui acara makan malam atau juga main golf, yang justru dianggap wajar oleh publik Jepang dan disebut sebagai tradisi baru birokrasi (Ike, 1958: 135-238).

Cara demikian kemudian menimbulkan dua sangkaan, yakni *Pertama*, Jepang dipimpin oleh persengkokolan antara birokrat dengan LDP (Partai Liberal Demokrat), di mana negara sebagai suprastruktur hanya mewakili kepentingan *the ruling class* yang memegang posisi dominan. Mereka berkoalisi dengan pengusaha bukan untuk membuat kebijakan guna melayani kepentingan masyarakat banyak, melainkan untuk kepentingan pengusaha dan mengamankan aset-asetnya; *Kedua*, Jepang dipimpin oleh koalisi birokrat-politisi, dan pengusaha sebagai wujud pelaksanaan strategi ekonomi untuk memudahkan pengaturan dan pengontrolan terhadap kebijakan sektor swasta dalam sistem ekonomi. Jadi di sini, kekuatan ekonomi Jepang telah membentuk kapitalisme yang didukung oleh kekuasaan pemerintah, dan birokrasi administrasi ikut berperan dalam menentukan kebijakan politik dalam negeri. Secara umum birokrasi Jepang tidak terdesentralisasi, tetapi terpusat dan dikelola secara profesional. Hanya saja praktek di lapangan, tatkala bersentuhan dengan kepentingan ekonomi maka peran kalangan birokrat sering dimanfaatkan.

4. Kekuatan Hegemoni Ekonomi-Politik Jepang

Pada saat Pandemi Covid 19, kepercayaan banyak pihak bahwa Jepang mampu mengatasi pandemi dan dampak pasca pandemi menemukan momentum, terutama Jepang sudah mengokohkan diri secara efektif dengan mengunci negara-negara tetangga pada posisi sub-ordinat, di mana Jepang berperan sebagai negara donor terutama bagi negara di kawasan ASEAN. Bagi Jepang, ASEAN bukan semata-mata mitra dalam kerja sama ekonomi, tetapi sekaligus sebagai salah satu kunci kesuksesan kemajuan ekonomi Jepang yang telah dimulai sejak tahun 1970-an (Al-Fadhat, 2019: 135). Itu sebabnya, melalui mekanisme kerjasama ASEAN+3, Jepang mengambil peran penting mempertahankan pengaruh di ASEAN, bersamaan dengan pengaruh Tiongkok

dan Korea Selatan. Sebagaimana pandangan terdahulu di atas, bahwa kesuksesan Jepang hari ini tidak lah terjadi seketika, melainkan berproses melalui jalan panjang selama ratusan tahun.

Cita-cita Jepang membangun kawasan persemakmuran Asia Timur Raya di bawah naungannya, pernah direalisasi dengan mencetuskan Perang Pasifik, yang dimulai dengan penyerangan mendadak terhadap pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbour, Hawaii, 7 Desember 1941. Setelah itu, gerakan invasi Jepang memasuki Asia Tenggara, dengan menguasai Filipina pada Januari 1942, dan Singapura pada Februari 1942. Faktor sumber daya alam mempengaruhi Jepang menginvasi Asia Tenggara. Tempat yang banyak sumber daya alam adalah wilayah Hindia-Belanda (Indonesia). Pada 10 Januari 1942, Tarakan sebagai wilayah Hindia-Belanda yang merupakan tambang minyak terbesar berhasil dikuasai Jepang, menyusul beberapa daerah tambang minyak lainnya. Seluruh kawasan Indonesia dikuasai pada 8 Maret 1942 dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati yang dilakukan Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborgh Stachouwer didampingi Jenderal Ter Poorten dengan Jenderal Hitoshi Imamura (Utomo, 1995: 179). Dengan demikian, pada periode 1940an kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah invasi Jepang secara militer.

Pada perkembangan pasca perang, peran Jepang secara nyata di Asia Tenggara ialah melalui perdagangan dan investasi. Periode pertama tahun 1950-1965 Jepang menjadi negara *intermediate* dalam hubungan segitiga Asia Pasifik di mana Jepang mengimpor barang-barang industri dari AS dan mengekspor manufaktur sederhana ke Asia Tenggara. Periode berikutnya tahun 1965-1975, ketika ekonomi Asia Tenggara mulai berkembang, Jepang merespons dengan meningkatkan investasi luar negeri untuk memproteksi pasar dan mengambil manfaat upah murah di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia menjadi penerima investasi manufaktur terbesar Jepang, khususnya tekstil, di mana hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan struktur industri domestik Jepang. Pada periode 1980an, Jepang berusaha meningkatkan nilai mata uang Yen dengan persetujuan Plaza Accord yang diusul ke AS seiring dengan melimpahnya modal Jepang dalam peningkatan investasi di kawasan. Era 1990an sampai 2000an, investasi Jepang di wilayah negara-negara berkembang Asia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina semakin meningkat, dan mengambil alih posisi AS sebagai investor terbesar, tetapi di negara-negara yang cenderung maju seperti Korea Selatan, Singapura, Taiwan

dan Hongkong justru menurun, yang dikenal sebagai kebijakan *first-tier economics* (Sungkar, 2011: 29-31).

Sub-ordinasi Jepang secara ekonomi dan politik terhadap negara-negara tetangga di kawasan Asia dan terutama Asia Tenggara nampak terlihat dari struktur produksi mobil regional, di mana perusahaan-perusahaan terkemuka Jepang mengambil manfaat dari kemajuan bidang transportasi dan komunikasi dengan meningkatkan pemilahan proses produksi dan mengatur manufaktur atas dasar lintas regional. Misalnya Toyota memanfaatkan Thailand memasok mesin diesel dan elektronik, kemudian memanfaatkan Filipina sebagai transmisi, memanfaatkan Malaysia untuk komponen kemudi, dan memanfaatkan Indonesia sebagai pemasok mesin berbahan bakar bensin (premium). Kondisi tersebut menggiring inisiatif politik negara di kawasan Asia Tenggara untuk berinvestasi lebih besar dalam bidang kendaraan bermotor. Keberhasilan model investasi Jepang kemudian ditiru Malaysia melalui kebijakan "Look East", walaupun belum berhasil optimal (Sungkar, 2011: 32-33). Namun di tangan Jepang, model investasi tersebut berhasil dan optimal sebagaimana dilihat dari berbagai investasi kendaraan bermotor merk Jepang lainnya di Asia.

Harus disadari bahwa kekuatan Jepang menjadi negara maju ialah karena didukung sistem perekonomian yang baik. Sejak masa pemerintahan *Shogun Tokugawa* (1603-1867) rakyat Jepang sudah terbiasa mandiri memajukan negaranya, tidak tergantung dengan Barat yakni melalui kebijakan politik isolasi (*Sakoku*). Kemajuan perekonomian Jepang juga didukung oleh kontribusi *Zaibatsu* yang memberikan bantuan pada masa pemerintahan Kaisar Meiji. Pemerintahan Meiji membuka kesuksesan Jepang menjadi negara yang kuat dalam sistem politik dan pemerintahan, angkatan perang, teknik serta perekonomian pertanian-perindustrian. Jepang memacu pembangunan ekonomi dan industri yang didukung dana besar. Dana pembangunan negara Jepang diperoleh dari perusahaan-perusahaan handal, di mana negara melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau para pemilik modal Jepang yakni kelompok *Zaibatsu*. *Zaibatsu* adalah kelompok pemilik uang, tempat orang kaya, para pedagang atau pengusaha, merupakan kelompok atau grup bisnis tertutup dan hanya dimiliki oleh keluarga (Rahardi; Handayani; Sumarjono, 2018: 66).

Kelompok *Zaibatsu* ini lah yang menopang sistem perekonomian Jepang baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui berbagai investasi. Dalam

perkembangannya mereka mendirikan perusahaan modern, yaitu Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, dan Yasuda. Perusahaan Mitsui memulai usahanya dengan perdagangan beras dan pemberian kredit di Osaka. Mitsubishi adalah perusahaan milik Iwasaki Yataro, seorang samurai yang pernah menjadi pemimpin perusahaan untuk klan Tosa. Perusahaan Sumitomo memulai usahanya dengan pertambangan di Kyusu. Perusahaan Yasuda berasal dari perusahaan samurai tingkat bawah, mendirikan usaha pertukaran keuangan (Handayani, 2014: 123).

Hingga hari ini, kekuatan ekonomi politik, industrisasi dan investasi Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah AS dan Tiongkok. Perkembangan ekonomi Jepang sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan ke perdagangan internasional, namun produktivitas lebih rendah di bidang agrikultural, distribusi, dan pelayanan. Jepang memiliki sumber daya alam yang rendah namun industri perdagangan membantunya memperoleh sumber daya untuk membangun ekonomi. Industri perdagangan Jepang ditopang oleh sektor jasa, industri, pertanian, perikanan. Kemajuan dalam berbagai sektor tersebut membuat Jepang banyak dilirik negara lain untuk menjadi mitra.

Di kawasan Asia Pasifik, Jepang dilirik Australia untuk pengembangan demokrasi dan ekonomi regional, sama seperti yang dikembangkan AS dan Tiongkok dengan Jepang. Kerjasama ekonomi regional merupakan kepentingan nasional yang signifikan bagi negara-negara mitra, dan kebanyakan dalam rangka membangun institusi baru di wilayah Asia Pasifik. Kemitraan yang dibangun bersama dengan Jepang berfungsi sebagai bagian dari strategi negara-negara mitra seperti Australia melalui inisiatif bersama dalam membangun lembaga ekonomi regional seperti Dewan Kerjasama Ekonomi Pasifik (PECC) pada tahun 1980 dan forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada tahun 1989, yang masing-masing berfungsi sebagai katalisator dalam mempromosikan keterlibatan regional negara-negara mitra Jepang (Nuryadin, 2020: 151).

Namun berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang dimiliki Jepang bukannya tanpa kelemahan. Kelemahan Jepang terletak pada enggannya elit ekonomi dan politik Jepang berhadapan langsung, bersaing, dan terlebih berbeda pendapat dengan AS. Melalui mekanisme IMF, bukan AMF sebagaimana dikehendaki Jepang, AS berhasil mengeksploitasi posisi puncaknya dan menggunakan pengaruhnya di berbagai organisasi

antarpemerintah di kawasan Asia. Faktanya, walaupun kehadiran ekonomi Jepang di lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF meningkat, namun tetap saja Jepang tidak berdaya mengartikulasikan, dan lebih-lebih merealisasi visi ekonomi bercorak Jepang bagi tatanan ekonomi dan politik internasional. Bahkan sejauh ini nampak Jepang ternyata masih bergantung kepada AS secara ekonomi dan politik strategis, sehingga membuat Jepang pada posisi sulit mengajukan agenda-agenda ekonomi dan politik di Asia yang melebihi kepentingan nasionalnya. Ini berarti peran Jepang dalam mekanisme ASEAN+3 dalam penanganan Covid 19 di Asia Tenggara dilakukan tatkala dapat menguntungkan Jepang secara ekonomi dan politik. Kondisi tersebut membuat inisiatif Jepang tidak selalu dipandang positif oleh negara anggota ASEAN, terutama negara-negara yang pernah memiliki pengalaman historis dengan Jepang.

Kelemahan Jepang berikutnya ialah kebijakan restrukturisasi industri yang berlebihan terhadap investasi luar negeri, baik di negara-negara yang menjadi obyek pasar produk industri maupun di negara yang biaya produksinya rendah. Hal ini menyebabkan terjadinya dikotomi antara dunia usaha Jepang dengan perekonomian negara tersebut. Di satu pihak perusahaan Jepang di luar negeri mengalami perkembangan luar biasa, sementara di pihak lain di dalam negeri perekonomian Jepang mengalami kendala bertumbuh baik. Ambil contoh misalnya Toyota berkembang demikian pesat dan memberi banyak keuntungan bagi negara-negara di mana Toyota berinvestasi, namun pertumbuhan ekonomi Jepang sebagai sebuah negara justru pernah mengalami titik terendah (Harinowo, 2005: 90-91). Kemudian secara geografis juga tidak menguntungkan bagi Jepang, yang menyebabkan sebagai kelemahan perkembangan ekonomi Jepang. Jepang yang terletak di kawasan Asia Timur sebagai wilayah yang sangat dinamis, di mana Jepang bertetangga dengan Tiongkok, Taiwan, Hongkong, dan Korea yang menempatkan Jepang sebagai negara yang memiliki *comparative advantage* di banding negara besar seperti AS atau India. Kedua negara terakhir ini dapat menjadi *big brother* bagi negara-negara tetangganya yang tentu juga berdampak positif bagi ketergantungan ekonomi (Harinowo, 2005: 82).

III. Penutup

Secara umum dapat dikatakan bahwa kebangkitan ekonomi, politik, sosial bahkan birokrasi Jepang berawal dari peristiwa Restorasi Meiji, yang membawa keterbukaan bagi semua struktur dan sistem dalam ketatanegaraan Jepang. Budaya Jepang yang berakar dari tradisi konfusianisme dipercaya menjadi semacam akar budaya bangsa Jepang dalam mewujudkan kebangkitannya. Peran negara kuat, sembari membangun masyarakat sipil yang kuat dengan cara memberi ruang berusaha secara luas bagi kelas pedagang dapat memberi pelajaran penting yang diambil dari Jepang dalam menopang sistem perekonomian. Hal ini mengonfirmasi pendekatan ekonomi politik kekuasaan Caporaso bahwa kebijakan ekonomi mesti diintervensi melalui kebijakan politik kekuasaan.

Selain pedagang, ruang serupa juga dihidupkan bagi kelompok masyarakat petani, kelompok birokrat dan militer sembari tetap memelihara tradisi lama sejak era pemerintahan Meiji, yakni memelihara status-quo kelompok lama melalui transformasi investasi. Jika tradisi sebelumnya kelompok lama menjadi samurai dan hanya berinvestasi dalam kelompok keluarga, maka transformasi menghasilkan kelompok samurai dapat berdagang dan usaha-usaha keluarga bertransformasi menjadi perusahaan besar multinasional seperti Mitsubhisi atau Sumitomo. Kekuatan ekonomi dengan ditopang kebijakan politik kekuasaan yang tepat, menghasilkan kekuatan negara Jepang hari ini, bahkan Jepang mampu menjadi negara donor bagi negara-negara lain di kawasan ASEAN dalam penanganan covid 19.

Hal penting lain yang dapat dipetik dari kebangkitan Jepang pasca Restorasi Meiji ialah kemauan seluruh elemen bangsa untuk berubah, termasuk kalangan aristokrat yang rela ditiadakan hak-hak istimewa mereka. Lalu pemerintah yang mau turun tangan langsung dengan menjadi investor, perencana dan pembaru bagi perbaikan seluruh kehidupan ekonomi dan politik di Jepang. Selain itu, keterlibatan masyarakat ekonomi Jepang yang sudah dilibatkan sejak ratusan tahun lalu dalam membangun sistem perekonomian negara, harus dilihat sebagai bagian integral dari kesuksesan ekonomi Jepang hari ini. Kemauan Jepang membuka diri dan beradaptasi dengan sistem politik demokrasi, juga membawa Jepang sukses membangun mitra dengan banyak negara guna menopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan investasi di luar negeri.

Daftar Pustaka

- Al-Fadhat, Faris. 2019. *Ekonomi Politik Jepang di Asia Tenggara: Dominasi dan Kontestasi Aktor-Aktor Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Briliantama, Rahadi, Sri Handayani, Sumarjono. 2018. "Zaibatsu's Role in Development of Japan in the Meiji's Emperor Period of Year 1868-1912", *dalam Jurnal Historica, Volume 2, Issue 1, February 2018*.
- Caporaso, James A., David P. Levine. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, Jhon W. 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approches*. New York: Sage Publication, Inc.
- Handayani. Sri, Gema Budiarto. 2014. *Dinamika Kepemimpinan Jepang Tahun 1668-1945*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Harinowo, Cyriilus, 2005. *Musim Semi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metode Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Ike, Nobutaka. 1958. "Japan", in Geroge McTurnan Kahin (Ed.). *Major Goverments of Asia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Lomperis, Timothy J. 2013. "Pemikiran Politik Asia", dalam Jhon T. Ishiyama dan Mairjke Breuning (Ed.). *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21, Sebuah Referensi Panduan Tematis*. Jakarta: Kencana.
- Moon, Chung In and Sang-Young Rhyu. 2000. "The State, Structural Rigidity, And The End Of Asian Capitalism: A Comparative Study Of Japan and South Korea", in Richard Robison, Mark Beeson, Kanishka Jayasuriya and Hyuk-Rae Kim (Ed.). *Politics and Markets in the Wake of the Asian Crisis*. London: Routledge.
- Norman, E. Herbert. 1946. *Japan's Emergence as a Modern State: Political and Economic Problems of the Meiji Period*. New York: The Comet Press.
- Nuryadin, Amanda Nabilla. 2020. "Menakar Kekuatan Politik Australia-Jepang: Studi Kerjasama Bilateral Bidang Ekonomi dan Pertahanan", *dalam POLITICON: Jurnal Ilmu Politik Vol. 2, No. 2, 2020*.

Skocpol, Theda. 1991. *Negara dan Revolusi Sosial: Suatu Analisa Komparatif Tentang Perancis, Rusia dan Cina*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sungkar, Sungkar. 2011. "Hubungan ASEAN-Jepang: Aspek Ekonomi Politik Internasional", dalam Rahadhian T. Akbar ((Ed.). *Ekonomi Politik Luar Negeri ASEAN: Sebuah Potret Kerjasama*. Yogyakarta: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar.

Utomo, Cahyo Budi. 1995. *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia: Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Press.

Yustika, Ahmad Erani. 2009. *Ekonomi Politik: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Antaraneews.com, 23 September 2020

Kompas, 17 April 2020.